



MODUL SESI 9
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
(PSD 327)

Materi 9
MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Disusun Oleh
Dr. Ratnawati Susanto., S.Pd., M.M., M.Pd

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2019

MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

A. Pendahuluan

Modul Manajemen Berbasis Sekolah merupakan penjabaran secara sistematis atas konsep dasar manajemen berbasis sekolah sehingga dapat menjadi landasan berpikir tentang pengetahuan konsep dan kemampuan dalam melakukan pengelolaan sekolah berdasarkan 7 pilar, yakni: (1) Pilar kurikulum dan pembelajaran, (2) pilar pendidik dan tenaga pendidikan, (3) pilar peserta didik, (4) pilar sarana dan prasarana, (5) pilar keuangan dan pembiayaan, (6) pilar hubungan sekolah dan masyarakat, (7) pilar budaya dan lingkungan sekolah.

Melalui konsep pengetahuan dan latihan praktik dalam 7 pilar manajemen berbasis sekolah, diharapkan kemampuan para mahasiswa berkembang melalui proses *Learning by doing* (belajar dengan melakukan), antara lain berkembangnya cara melakukan telaah dan kajian antara konsep manajemen, situasi aktual di lapangan dan bagaimana menjembatani kesenjangan dengan pola manajemen berbasis sekolah. Melalui proses ini maka diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir, bertindak, membuat kesimpulan dan mengambil keputusan secara efektif dan efisien dalam manajemen berbasis sekolah.

B. Kompetensi Dasar

Mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep Manajemen Keuangan dan Pembiayaan dengan kondisi di lapangan

C. Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Membuat deskripsi implementasi manajemen keuangan dan pembiayaan secara aktual di tingkat sekolah.

D. KEGIATAN BELAJAR

1. Kegiatan Belajar 1

Pembelajaran untuk modul sesi 9 dilaksanakan dengan metode *tutorial learning*, yang meliputi tahapan : diskusi, tanya jawab, latihan dan penugasan, project, studi kasus dan penyusunan laporan serta presentasi.

2. Uraian dan contoh

(Risa alkurnia, 2015) Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting saat ini. Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Salah satu unsur yang harus dimiliki oleh suatu sekolah agar sekolah dapat berjalan dengan baik adalah dari segi keuangan adalah pengelolaan keuangan. Menurut Wijaya (2009) bahwa pendidikan yang mahal tidak secara otomatis menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi, karena tinggi rendahnya biaya pendidikan ditentukan oleh manajemen keuangan sekolah. Sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara atau Daerah bahwa pengelolaan uang adalah pengelolaan kas dan surat berharga termasuk menanggulangi kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Sekolah sebagai institusi pemerintah diawasi oleh kepala sekolah dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa pengendalian internal dan pengawas fungsional daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengendalian fungsional.

(Kurni & Susanto, 2018) Pembelajaran yang efektif tidak lepas dari pengelolaan kelas. Tugas pendidik yang penting dilakukan, yaitu mengelola kelas yang bertujuan agar situasi dan kondisi kelas yang dapat memfasilitasi terjadinya interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik. Dalam kondisi ini, tentu memerlukan suatu proses pengelolaan kelas secara baik dan benar untuk menghasilkan kualitas proses pembelajaran.

(Arwildayanto, Nina Lamatenggo, 2017) Lembaga pendidikan dari semua jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, sekolah sampai perguruan tinggi merupakan entitas organisasi yang dalam operasionalnya memerlukan dan membutuhkan uang (money) untuk menggerakkan semua sumber daya (resource) yang dimilikinya. Dalam pemahaman Rofiq, A. (2017) menjelaskan bahwa uang ini termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu mencapai tujuan pendidikan. keuangan pendidikan (financial management education), anggaran pendidikan (education budget), pendanaan pendidikan (education funding), dan pembiayaan pendidikan (financing education). Keempat istilah ini menjadi satu kesatuan dalam memaknai konsepsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dan turunannya baik konseptual strategis, taktis, teknis dan operasional.

(Jaenudin & Suroto, 2017) Pengelolaan manajemen keuangan pada setiap instansi atau lembaga baik pendidikan maupun non-pendidikan sangat perlu dilakukan untuk mengatur aktivitas kinerja. Pengelolaan dalam lembaga pendidikan meliputi banyak aspek, salah satunya yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah perencanaan,

pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien. Menurut Hasibuan (2011: 2) menjelaskan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisah tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan.

(Kurniady, 2015) Dalam memperhitungkan biaya pendidikan, sekolah dalam menggunakan biaya hanya berdasar pada berapa dana yang ada untuk menjalankan rangkaian kegiatan pembelajaran dan pengajaran, bukan kepada berapa besar dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut, agar mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Berdasarkan paparan permasalahan-permasalahan yang telah diungkapkan, sekolah dalam membiayai kegiatan pembelajaran dan pengajaran berdasarkan program yang menjadi prioritas, hanya mengacu pada pengalaman-pengalaman yang sudah dilaksanakan sebelumnya, belum berdasarkan pada kegiatan atau aktivitas apa saja yang seharusnya menjadi fokus pembiayaan, agar proses pendidikan dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik.

A. Konsep Manajemen Keuangan dan Pembiayaan

(Risa alkurnia, 2015) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip tersebut selaras dengan reformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Renstra Ditjen Dikmen) memperhatikan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Reformasi birokrasi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada rencana strategis 2010-2014 dan misi 5K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian, sebagai landasan perencanaan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah juga dilandasi oleh prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.

Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

(Zubaidah, 2016) Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengolahan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan implementasinya di sekolah, manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan sekolah. Biaya pendidikan adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak dan (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif, yang harus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif.

(Budaya, 2018) Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan, pembiayaan sebagai faktor pendukung. Proses belajar mengajar akan terlaksana berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Senada disampaikan oleh Fatah (2006) bahwa pembiayaan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional, dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, administrasi sekolah dan pengawasan.

(Zubaidah, 2016) Ada beberapa konsep penting dalam pembiayaan pendidikan yaitu:

- Opportunity cost (biaya nyata) dari suatu kegiatan adalah biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu keputusan tentang penggunaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu kegiatan, dan bukan untuk tujuan yang lain.
- Monetary expenditure adalah konsep akuntansi yang berhubungan dengan sejumlah pembayaran dengan mata uang untuk pembelian barang atau jasa untuk suatu kegiatan.
- Current expenditure adalah bentuk pengeluaran biaya yang dilakukan dengan segera dan berulang-ulang. Misalnya, pengeluaran biaya untuk gaji guru atau pegawai, pembelian alat belajar, pembayaran listrik berlangganan, air, telepon dan sebagainya.
- Capital expenditure adalah bentuk pengeluaran biaya yang dilakukan untuk jangka waktu yang panjang dan akan diulang sesudah beberapa tahun kemudian. Misalnya pengeluaran biaya

pembangunan gedung sekolah, ruang laboratorium dan sebagainya.

- Imputed annual adalah bentuk pengeluaran biaya untuk menyewa fasilitas.
- Private cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing individu orang tua atau anggota masyarakat untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, misalnya untuk pembelian pakaian seragam, buku pelajaran, dan lain sebagainya.
- Social cost adalah pengeluaran biaya yang dilakukan untuk berlangsungnya pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, misalnya untuk pembayaran gaji guru atau pegawai, untuk perawatan dan operasional pendidikan, seperti peralatan kantor, listrik, air dan lain sebagainya.
- Current price expenditure dan constant price expenditure adalah konsep biaya yang berhubungan dengan harga barang dan jasa pada sistem pendidikan yang memiliki tendensi kenaikan atau penurunan harga.
- Fixed cost merupakan biaya tetap yang dikeluarkan untuk penggandaan barang-barang modal seperti untuk pembangunan gedung sekolah, penggandaan peralatan sekolah, pembayaran sewa fasilitas sekolah, dan lain sebagainya.
- Total, average, and marginal cost merupakan konsep biaya yang ditujukan untuk menentukan tambahan jumlah siswa yang diterima dan yang berhubungan dengan seluruh biayanya. Total cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan biaya pendidikan. Average cost adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk suatu jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan marginal cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan tertentu yang keadaannya sangat bervariasi.

(Jaenudin & Suroto, 2017) Manajemen keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung pada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu

menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakat.

(Arwildayanto, Nina Lamatenggo, 2017) Memahami dan mendalami konsep tentang manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dari turunan, bisa kita mencermati pemikiran sederhana (simple) tentang manajemen keuangan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam menggerakkan para bawahannya untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan keuangan (penganggaran), pengelolaan berupa pengeluaran (pencairan), penggunaan, pencatatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan uang yang dimiliki oleh suatu institusi (organisasi), termasuk di dalamnya lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan. Intinya dari manajemen keuangan pendidikan, mengelola uang yang ada dan menyiapkan dan melaksanakan instrumen administratif untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi urgen posisinya untuk diaplikasikan, karena secara normatif dan sosiologis entitas sekolah bukanlah lembaga yang bersifat profit, sehingga memberikan tanggung jawab bagi masyarakat dan setiap orang tua siswa, dimana setiap penerimaan lembaga pendidikan harus digunakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan yang professional. Hal ini dilandasi; 1) adanya tuntutan untuk mampu mengelola penggunaan dana secara transparan dan akuntabel, 2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya, 3) meminimalkan penyalahgunaan dana yang dihimpun, 4) kreatif menggali sumber-sumber pendanaan, 4) menempatkan bendahara yang kompeten dan professional (Santoso, U. & Pambelum, Y.J., 2008).

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan keberhasilan layanan pendidikan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Urgensi komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan komponen produktif dan strategis yang menentukan terlaksananya layanan pendidikan. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Sudarmanto (2009, 1) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan biaya sosial (social cost) dan biaya pribadi (privat cost) yang digunakan untuk membiayai pendidikan terhadap kualitas pelaksanaan pembelajaran, dan prestasi belajar siswa. Dengan kata lain setiap layanan yang dilakukan lembaga pendidikan tentu memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar uang yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Dari berbagai pemahaman tentang manajemen keuangan pendidikan maupun pengelolaan keuangan pendidikan. Pada pokoknya dapat disederhanakan pemahamannya. dimana pengelolaan keuangan pendidikan dapat dikelompokkan dalam 3 komponen utama, yaitu perencanaan keuangan (financial planning) mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa efek samping yang merugikan, yang kedua pelaksanaan (implementation involves accounting), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat, selanjutnya evaluasi

berupa penilaian terhadap pencapaian tujuan dari yang didanai (Jones, 1985).

Dari penjelasan itu, dapat ditarik sintesis, manajemen keuangan pendidikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur mengelola keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan. Adapun kegiatan inti yang ada dalam manajemen keuangan pendidikan bisa dikelompokkan dalam tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran (budgeting), pembukuan (accounting), pemeriksaan (auditing). Jika ketiga komponen ini dilakukan secara professional maka manajemen keuangan pendidikan bisa berjalan dengan efektif dan efisien, guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

B. MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Fungsi manajemen keuangan sekolah adalah:

Bersumber dari Wikipedia tentang fungsi manajemen keuangan kemudian diintegrasikan dalam fungsi manajemen keuangan sekolah yaitu :

1. Perencanaan Keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
2. Penganggaran Keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.
3. Pengelolaan Keuangan, menggunakan dana sekolah untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
4. Pencarian Keuangan, mencari dan mengeksplorasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan sekolah.
5. Penyimpanan Keuangan, mengumpulkan dana [sekolah](#) serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut.
6. Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada [sekolah](#).
7. Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keuangan [sekolah](#) yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.
8. Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan [sekolah](#) sekaligus sebagai bahan evaluasi

Sumber keuangan sekolah:

1. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Sumber keuangan yang berasal dari pemerintah baik itu pemerintah pusat, tingkat Propensi, dan pemerintah daerah. Seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dan dana bantuan operasional (BOP).
2. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa, dana yang dikumpulkan dari pengurus BP3/ komite sekolah dari orang tua siswa.
3. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/wali siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan

perusahaan, sumbangan perusahaan industri, lembaga sosial donatur, tokoh masyarakat, alumni, dsb.

Pemanfaatan Keuangan Sekolah

UUSPN Tahun 2003 Pasal 48 Ayat 1, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akubilitas public.

Adapun cara memanfaatkan keuangan sekolah sebaiknya dengan langkah :

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
2. Pengadaan dan pengalokasian anggaran berdasarkan RAPBS
3. Pelaksanaan anggaran sekolah
4. Pembukuan keuangan sekolah
5. Pertanggung jawaban keuangan sekolah
6. Pemantauan keuangan sekolah
7. Penilaian kinerja manajemen keuangan sekolah

Perencanaan Keuangan

(Budaya, 2018) Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan, pembiayaan sebagai faktor pendukung. Proses belajar mengajar akan terlaksana berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Senada disampaikan oleh Fatah (2006) bahwa pembiayaan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional, dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, administrasi sekolah dan pengawasan.

(Arwildayanto, Nina Lamatenggo, 2017) Dari sisi kegiatan, manajemen keuangan pendidikan, penganggaran dan pembiayaan pendidikan meliputi upaya memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991). Hal senada dijelaskan Abdullah (2011;2) mendefinisikan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan itu sebagai kegiatan mengatur sumber keuangan pendidikan, mengalokasikan, dan mengandalkan uang pendidikan sedemikian rupa sehingga dicapai maksimalisasi dan efektivitas penggunaan dana atau uang untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi.

(Jaenudin & Suroto, 2017) Fokus manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bersifat publik, menurut Abdullah (2011;12) merupakan upaya pengelolaan sumber dana yang tersedia di lembaga pendidikan untuk dapat dipergunakan seefektif mungkin, dalam pengertian bahwa dana (uang) yang tersedia itu bisa dipergunakan untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan perencanaan (budgeting) yang sudah

ditetapkan. Di samping itu, Nawawi (1989,68) menjelaskan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengelola keuangan lembaga pendidikan dengan membuat berbagai kebijaksanaan dalam pengadaan, penggunaan keuangan guna mewujudkan kegiatan organisasi lembaga pendidikan berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan lembaga pendidikan itu sendiri. Turunan tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan ini menegaskan fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi acuan dalam dokumen:

- Perencanaan Keuangan dengan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
- Penganggaran Keuangan berupa tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.
- Pengelolaan Keuangan dengan menggunakan dana lembaga pendidikan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
- Pencarian Keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.
- Penyimpanan Keuangan berupa mengumpulkan dana lembaga pendidikan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut.
- Pengendalian Keuangan berupa evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.
- Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keuangan lembaga pendidikan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.
- Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan lembaga pendidikan sekaligus sebagai bahan evaluasi.

Aktivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan di atas menjadi indikator bagi keberhasilan satuan pendidikan dalam mengelola keuangan dan pembiayaan pendidikan.

Bahwa hal pertama yang dilakukan pada perencanaan keuangan dan pembiayaan adalah dengan mengadakan rapat yang membahas tujuan strategis dalam jangka waktu tertentu misalnya jangka waktu pendek, menengah dan panjang. Selanjutnya pihak sekolah mengadakan rapat untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Rapat komite dilakukan dengan melibatkan pihak sekolah, komite sekolah dan wali murid. Rapat komite membahas mengenai keberlangsungan aktivitas pembiayaan yang disusun dalam RAPBS sebagai gambaran mengenai pendapatan dan pengeluaran atau belanja sekolah dalam jangka waktu tertentu yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Perencanaan anggaran belanja sekolah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah yang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan hasilrapat. Pembagian proporsi biaya tersebut untuk kebutuhan sekolah seperti sarana dan prasarana, pengembangan SDM guru, honor GTT, biaya perjalanan, biaya perawatan sekolah, pembelian bahan habis pakai, peningkatan akademik siswa, dan

keperluan-keperluan lainnya terkait dengan proses belajar mengajar dikelas.

Implementasi

(Jaenudin & Suroto, 2017) Implementasi atau pengelolaan keuangan sekolah dialokasikan sesuai dengan RAPBS (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) dan kebutuhan yang sudah dianggarkan sebelumnya, sedangkan jika ada biaya-biaya lain yang tidak terduga dibiayai dari dana yang belum terpakai. Namun dalam pelaksanaannya di beberapa sekolah masih terdapat kendala karena penggunaan dana yang meyeluruh dan dana bantuan dari BOSN (Bantuan Operasional Sekolah Nasional) diberikan secara rutin 3 bulan sekali. Kontribusi antara kepala sekolah dan bendahara menunjukkan kerjasama yang sangat baik sehingga beberapa program kegiatan pengembangan dapat terealisasi dengan cukup baik. Meskipun semua operasional sekolah sudah dibiayai oleh dana BOS, pengembangan sarana prasarana sekolah masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan tata kelola keuangan belum terealisasi dengan baik sesuai dengan harapan mengingat kebutuhan masing-masing sekolah berbeda.

(Kurniady, 2015) Dana yang dialokasikan kedalam program-program yang menjadi prioritas, dan kemampuan mengajar tenaga pendidik, mengakomodasi atau memfasilitasi peningkatan hasil belajar peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Peningkatan kemampuan dan keterampilan Kepala Sekolah dalam mengelola pembiayaan pendidikan untuk memanfaatkan dana yang dialokasikan pada program prioritas, sehingga proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kejelasan pendistribusian dana untuk membiayai program-program yang menjadi prioritas. Perencanaan pembiayaan pendidikan atau penganggaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, memfokuskan pada memilih program prioritas yang paling utama untuk dibiayai dalam mendukung peningkatan proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Evaluasi

(Kurniady, 2015) Evaluasi merupakan upaya pemberian pertimbangan nilai keberhasilan suatu program sebagai bahan untuk pembuatan keputusan mengenai kelanjutan program, pengembangan program dan atau penghentian program. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi ini diarahkan pada pelaksanaan program atau kegiatan yang menjadi skala prioritas.

(Jaenudin & Suroto, 2017) Pertanggungjawaban keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dan pertanggung jawaban harus dilakukan untuk mengetahui penggunaan dana yang telah dikeluarkan karena menyangkut kepentingan

(pemerintah, komite, dan wali murid). Dalam proses evaluasi dan pertanggung jawaban ada beberapa hal yang akan dibahas yaitu meliputi hal apa saja yang telah dilakukan, sesuai atau tidak dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk merumuskan langkah berikutnya apabila ada yang tidak sesuai dengan rencana awal. Proses evaluasi pada dilakukan secara rutin yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, karena setiap akhir tahun anggaran sekolah dituntut untuk mempertanggung jawabkan setiap dana yang dikeluarkan selama tahun anggaran.

Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah

Pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus dipertanggung jawabkan, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan adalah:

1. Semua pemasukan dan pengeluaran atau pembelanjaan tertulis dalam pembukuan keuangan.
2. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sekolah.
3. Mempertanggung jawaban keuangan sekolah kepada dinas terkait.
4. Mempertanggung jawaban keuangan sekolah kepada oleh kepala sekolah dan bendahara kepada komite sekolah, tenaga penganjar dan tenaga kependidikan

C. Rangkuman

1. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan disekolah. Sebagaimana yang terjadi disubstansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Manajemen keuangan sekolah adalah sesuatu yang sangat penting dalam mendukung kualitas pendidikan. Semua administrasi keuangan dan pertanggung jawabannya ditentukan oleh undang-undang yang ada.
2. Undang-Undang nomer 20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan manajemen keuangan sekolah yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran seolah. sedangkan fungsi manajemen keuangan antara lain: perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan,

pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, dan pelaporan keuangan.

3. Pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten dan kota serta propinsi maupun masyarakat dan dunia usaha. Pembiayaan pendidikan direncanakan berdasarkan pada kebutuhan sekolah sesuai dengan skala prioritas yang meliputi: gaji guru, gaji pegawai, kesejahteraan, peningkatan sumber daya manusia, pembiayaan sarana dan prasarana dan peningkatan potensi siswa dan guru. Perwujudan pembiayaan pendidikan diimplementasikan dalam peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta melakukan bimbingan secara intensif kepada siswa terutama menghadapi ujian akhir nasional. Untuk di luar proses belajar mengajar diberikan pengembangan bakat dan minat siswa yang didukung dengan sarana dan prasarana yang maksimal. Manajemen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar disekolah bersama komponen-komponen lain, dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari.

D. LATIHAN

Latihan

Petunjuk Latihan : Jawablah pertanyaan pilihan ganda berikut ini dengan mempelajari terlebih dahulu kegiatan belajar di atas.

1. Pengelolaan manajemen keuangan pada setiap instansi atau lembaga baik pendidikan maupun non-pendidikan sangat perlu dilakukan untuk mengatur...
 - a. Aktifitas program
 - b. Aktivitas kinerja
 - c. Aktivitas individu
 - d. Aktivitas organisasi
2. Pengelolaan dalam lembaga pendidikan meliputi banyak aspek, antara lain adalah...
 - a. Pengelolaan keuangan
 - b. Pengelolaan perencanaan
 - c. Pengelolaan manajemen
 - d. Pengelolaan administrasi
3. Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah.....
 - a. perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi..

- b. Pengadministrasian, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi,
 - c. Pengontrolan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi..
 - d. Penataan, perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi..
4. Keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar
 - a. Sumber dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien
 - b. Anggaran dapat dialokasikan dengan tepat
 - c. Dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien
 - d. Alokasi dana dapat disosialisasikan dengan baik
 5. Dalam memperhitungkan biaya pendidikan, sekolah dalam menggunakan biaya hanya berdasar pada berapa dana yang ada untuk menjalankan rangkaian kegiatan pembelajaran dan pengajaran, bukan kepada
 - a. Berapa besar dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut
 - b. Berapa banyak jumlah pendonor kegiatan
 - c. Berapa banyak terserap dana anggaran
 - d. Berapa realisasi dibandingkan engna jumlah penerima dan pendonor
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip...
 - a. Kemanjuran, keadilan, objektivitas, keterbukaan
 - b. Keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik
 - c. Kemasyuran, pengelolaan, kemandirian, kedewasaan
 - d. Pertanggungjawaban, subjektivitas, keadilan, transparansi
 7. Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi
 - a. Pengelolaan, perkiraan, pengadiminstrasian dan evaluasi
 - b. Penataan, pencatatan, pengkordinasian dan supervisi
 - c. Pengelolaan, pendataan, peleporan, evaluasi
 - d. Pencatatan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

8. Beberapa prinsip pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut, kecuali...
 - a. Opportunity
 - b. Monetary expenditure
 - c. Current expenditure
 - d. Asset expenditure

9. Pengeluaran biaya yang dilakukan untuk berlangsungnya pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, misalnya untuk pembayaran gaji guru atau pegawai, untuk perawatan dan operasional pendidikan, seperti peralatan kantor, listrik, air dan lain sebagainya.....
 - a. Social cost
 - b. Current price expenditure
 - c. Fixed cost
 - d. Toal cost

10. Fungsi manajemen keuangan adalah sebagai berikut, kecuali.....
 - a. Perencanaan Keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
 - b. Penganggaran Keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.
 - c. Pengelolaan Keuangan, menggunakan dana sekolah untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
 - d. Pencarian Keuangan, memanfaatkan sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan sekolah.

KUNCI JAWABAN

1. B
2. A
3. A
4. C
5. A
6. B
7. D
8. D
9. A

10.D

F. TES FORMATIF

Petunjuk :

Jawablah dengan singkat, tepat dan jelas pertanyaan nomor 1 – 5!

Soal :

1. Lembaga pendidikan dari semua jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, sekolah sampai perguruan tinggi merupakan entitas organisasi yang dalam operasionalnya memerlukan dan membutuhkan uang (money) untuk menggerakkan semua sumber daya (resource) yang dimilikinya. Jelaskan makna dari kalimat ini !
2. Sebutkan 4 prinsip pengelolaan dana pendidikan menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48.
3. Sebutkan 10 konsep penting dalam pembiayaan pendidikan !
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan social cost dalam pembiayaan pendidikan !
5. Identifikasikan 3 sumber keuangan sekolah !

KUNCI JAWABAN

1. Dalam pemahaman menjelaskan bahwa uang ini termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu mencapai tujuan pendidikan. keuangan pendidikan (financial management education), anggaran pendidikan (education budget), pendanaan pendidikan (education funding), dan pembiayaan pendidikan (financing education). Keempat istilah ini menjadi satu kesatuan dalam memaknai konsepsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dan turunannya baik konseptual strategis, taktis, teknis dan operasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

3. 10 Konsep penting dalam pembiayaan pendidikan adalah:
 - a. Opportunity cost
 - b. Monetary expenditure
 - c. Current expenditure
 - d. Capital expenditure
 - e. Imputed annual
 - f. Private cost
 - g. Social cost
 - h. Current price expenditure
 - i. Fixed cost
 - j. Total, average

4. Social cost adalah pengeluaran biaya yang dilakukan untuk berlangsungnya pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, misalnya untuk pembayaran gaji guru atau pegawai, untuk perawatan dan operasional pendidikan, seperti peralatan kantor, listrik, air dan lain sebagainya

5. 3 sumber keuangans ekolah:
 - a. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Sumber keuangan yang berasal dari pemerintah baik itu pemerintah pusat, tingkat Propensi, dan pemerintah daerah. Seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dan dana bantuan operasional (BOP).
 - b. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa, dana yang dikumpulkan dari pengurus BP3/ komite sekolah dari orang tua siswa.
 - c. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/wali siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan, sumbangan perusahaan industri, lembaga sosial donatur, tokoh masyarakat, alumni, dsb.

Kunci Jawaban:

:

Pedoman Penskoran::

No 1 Skor maksimal 5

No 2 Skor maksimal 5

No 3 Skor maksimal 5

No 4 Skor maksimal 5

No 5 Skor maksimal 5

Total skor = 25

Penilaian = (Jumlah skor diperoleh /2,5) x 10

G. VIDEO TUTORIAL

Untuk meningkatkan pemahaman maka video tutorial mengenai Manajemen Keuangan dan Pembiayaan ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan dapat diunduh melalui:

<https://youtu.be/F0aYAB2J2ig>

H. PENGAYAAN

Untuk mengembangkan pemahaman lebih lanjut, maka kita akan memperkaya pemahaman dengan menganalisis artikel jurnal penelitian dengan judul :

Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah terhadap Kualitas Pendidikan

Oleh: David Wijaya

Pada [http: http://bpkpenabur.or.id/wp-content/uploads/2015/10/jurnal-No13-Thn8-Desember2009.pdf#page=88](http://bpkpenabur.or.id/wp-content/uploads/2015/10/jurnal-No13-Thn8-Desember2009.pdf#page=88)

I. FORUM

Setelah melakukan kajian pada artikel pengayaan maka pengalaman belajar selanjutnya adalah diskusikan hal-hal esensial apa yang dapat ditarik atas artikel tersebut?

J. Daftar Pustaka

Mulyasa, E. 2014. Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi., Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Wijaya, David (2009). Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah terhadap Kualitas Pendidikan , Jakarta: Jurnal Pendidikan Penabur, No 11 Tahun kr 4. : <http://bpkpenabur.or.id/wp-content/uploads/2015/10/jurnal-No13-Thn8-Desember2009.pdf#page=88>

Arwildayanto, Nina Lamatenggo, dan W. T. S. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Retrieved from file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Buku-Manajemen-Keuangan-dan-Pembiayaan-Jilid-I.pdf

Budaya, B. (2018). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR YANG EFEKTIF, 18. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/235000-manajemen-pembiayaan-pendidikan-pada-sek-ff723531.pdf>

Jaenudin, A., & Suroto. (2017). ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN SEKOLAH DI SD NEGERI SE-KECAMATAN WAY TUBA. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/172120-ID-analisis-pengelolaandan-pengawasankeuang.pdf>

- Kurni, D. K., & Susanto, R. (2018). PENGARUH KETERAMPILAN MANAJEMEN KELAS TERHADAP KUALITAS PROSES PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR PADA KELAS TINGGI, 2. Retrieved from <http://ratnawati.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/5930/2019/03/PENGARUH-KETERAMPILAN-MANAJEMEN-KELAS-TERHADAP-KUALITAS-PROSES-PEMBELAJARAN-DI-SEKOLAH-DASAR-PADA-KELAS-TINGGI-.pdf>
- Kurniady, D. A. (2015). PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BANDUNG. Retrieved from <http://jurnal.upi.edu/file/4.pdf>
- Risa alkurnia, A. A. (2015). Pengelolaan Manajemen Keuangan Pada Lembaga Pendidikan. Retrieved from <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snpe/article/download/10710/8387>
- Zubaidah, S. (2016). MANAJEMEN KEUANGAN DAN BIAYA PENDIDIKAN DI MADRASAH TSANAWIYAH NURUL MUJTAHIDIN. Retrieved from https://www.academia.edu/37092091/MANAJEMEN_KEUANGAN_DAN_BIAYA_PENDIDIKAN